

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah ekowisata pada suatu sisi mengacu pada suatu konsep yang didasari oleh sejumlah prinsip, dan pada sisi lain merupakan suatu segmen pasar khusus. Ekowisata didefinisikan sebagai suatu bentuk wisata berbasis alam, tetapi juga telah diformulasikan dan dipelajari sebagai suatu alat pembangunan berkelanjutan oleh berbagai pihak sejak tahun 1990 (Wood, 2002).

Penyu merupakan hewan perairan laut, yang hidupnya mulai dari perairan laut dalam hingga perairan laut dangkal. Kadang-kadang penyu juga berada di daerah pantai dan biasanya digunakan untuk bertelur. Penyu bertelur ketika terjadi air pasang penuh, induk penyu akan berenang menuju ke pantai yang berpasir dan melakukan beberapa tahapan proses peneluran yaitu merayap, membuat lubang badan, membuat lubang sarang, menutup lubang badan, memadatkan pasir di sekitar lubang badan, istirahat, membuat penyamaran sarang dan kembali ke laut (Warikry, 2009).

Terdapat 6 (enam) jenis penyu yang ditemukan di Indonesia yaitu penyu lekang (*Lepidochelys, sp*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu tempayan (*Caretta caretta*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), dan penyu pipih (*Natator depressus*), tersebar di perairan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia (Dahuri dalam Damanhuri, 2003).

Populasi penyu di Indonesia cenderung terus menurun, dimana penurunannya terutama disebabkan oleh faktor manusia (pengambilan telur penyu,

perburuan penyu, degradasi habitat penyu dan pengambilan sumber daya hayati yang menjadi makanan penyu) dibandingkan dengan faktor alam dan adanya predator (Adnyana *et al.*, 2009).

Ancaman utama terhadap populasi penyu adalah kegiatan antropogenik, yaitu pencemaran pantai dan laut, perusakan habitat peneluran, perusakan daerah mencari makan, gangguan pada jalur migrasi, konsumsi dan perdagangan penyu serta adanya alih fungsi habitat sebagai tempat pariwisata. Akibat dari penurunan populasi, penyu lekang telah masuk dalam daftar merah *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) untuk kategori *Vulnerable* (IUCN, 2016).

Habitat bersarang penyu yang dijumpai di daerah tropis umumnya tidak ditumbuhi oleh pohon-pohonan atau di tempat yang luas dan terang (Nuitja, 1992). Penyu umumnya memilih kawasan pantai untuk bertelur yang berdataran luas dengan rata-rata kemiringan 30° , serta di atas pasang surut antara 30 cm sampai 80 cm. Telur-telur diletakkan pada sarang yang berada antara 8 sampai 41 meter dari titik air pasang laut tertinggi agar tidak terendam air. Penyu bertelur sebanyak 4 sampai 5 kali dalam setahun dengan interval waktu antara 10 sampai 14 hari. Penyu mampu bermigrasi hingga sejauh 2.300 km dari daerah peneluran semula (Nuitja, 1992).

Di Sumatera Barat memiliki beberapa penangkaran penyu, salah satunya khusus penangkaran berbasis ekowisata berada di Nagari Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan ini telah berdiri sejak tahun 2015. Ekowisata penyu ini telah berhasil dalam konservasi penyu, baik penyelamatan terhadap habitat penyu, penetasan telur dan realis tukik. Setidaknya jenis penyu yang dikonservasi di penangkaran ini yakni jenis: penyu lekang, penyu hijau dan penyu sisik (BPSPL Padang, 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan (2018)

menjelaskan bahwa Kecamatan Sutera mempunyai luas daerah 455.65 km², letak geografis 100° 30' – 100° 57' BT 1° 30' -1° 39' LS dengan batas daerah sebelah Utara yaitu Kecamatan Batang Kapas, sebelah Selatan Kecamatan Lengayang, sebelah Barat Samudera Indonesia, dan sebelah Timur adalah Kabupaten Solok. Ketinggian Kecamatan Sureta, Nagari Ampiang Parak dari permukaan laut yaitu 2-150 m.

BPSPL Padang (2017) menjelaskan bahwa kelompok “Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Ampiang Parak” terbentuk dari keinginan sebagian masyarakat dimana mereka melihat pantai banyak tergerus oleh abrasi laut dan pantai terlihat tandus tidak ada tanaman di pinggir pantai, sehingga timbul keinginan kelompok untuk menanam pohon waru (*Hibiscus tiliaceus*). Secara swadaya Kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan, Ampiang Parak mencoba menanam pohon waru tersebut dengan keterbatasan anggaran yang ada. Pada tahun 2016 Kelompok tersebut mendapat bantuan penanaman pohon cemara laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sehingga kelompok masyarakat tersebut mendapat mandat untuk mengelola dan menjaga keberlangsungan dari pertumbuhan cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) tersebut.

Penanaman cemara laut yang di kelola oleh kelompok masyarakat sudah tumbuh dan berkembang dengan baik, akibat berkembangnya tumbuhan cemara laut tersebut banyak penyu yang mendarat untuk bertelur, sehingga kelompok masyarakat berinisiatif untuk membuat konservasi penyu. Kelompok Laskar pemuda peduli lingkungan adalah kelompok masyarakat nelayan yang berada di pinggir pantai yang sebagian besar berprofesi nelayan. Jarak antara permukiman masyarakat dengan lokasi konservasi penyu, cemara laut dan mangrove di pisahkan oleh muara sungai yang berada di seberang yang melewati aliran sungai. Melalui Keputusan Wali

Nagari Ampiang Parak No. 225/01/KPTS-WN/AP/I-2013 Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Ampiang Parak terbentuk kemudian di perkuat dengan Akta Notaris "Lembaga Kelompok Konservasi LPPL Ampiang Parak dengan Nomor 22 Tertanggal 1 Maret 2016" (BPSPL Kota Padang, 2017)

Kehadiran lokasi penangkaran ekowisata penyu ini tidak hanya menyerap wisatawan untuk memiliki pengetahuan mengenai penyu, namun kehadiran wisatawan justru akan memberikan dampak sehingga penyu semakin berkurang, hal ini dikarenakan pantai berpasir yang berubah menjadi pantai yang banyak aktivitas, dapat mengganggu penyu dan dalam pengembangan ke depan akan berdampak terhadap penyu.

Penyu berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, sehingga diperlukan informasi terkait tipologi habitat penelurannya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terkait dengan sistem tata kelola dalam pengembangan wisata alam berbasis ekowisata khususnya dalam perspektif pelayanan publik masyarakat lokal serta penerapan strategi pengelolaan untuk pengembangan ekowisata penyu berbasis masyarakat di Nagari Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Penerapan ekowisata khusus untuk penyu diharapkan dapat menerapkan konsep ekowisata yang sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku dalam UU No 5 tahun 1990 yakni tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan demikian salah satu cara untuk mengurangi eksploitasi terhadap penyu secara ilegal dan mengurangi kerusakan kawasan habitat serta memberikan usulan strategi pengelolaan untuk pengembangan ekowisata penyu di Pantai Ampiang Parak Pesisir Selatan diperlukan alternatif pendukung pada kawasan

ekowisata alam yang sesuai dengan daya dukung kawasan. Ekowisata alam akan memberikan alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat di sekitar kawasan dan meningkatkan pendapatan daerah Pesisir Selatan pada umumnya. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "Pengembangan Ekowisata Penyu Berbasis Masyarakat di Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengembangan wisata alam berbasis ekowisata dalam perspektif pelayanan publik masyarakat lokal di Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimanakah perencanaan lanskap ekowisata penyu berbasis masyarakat di pantai Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengembangan wisata penyu berbasis ekowisata dalam perspektif pelayanan publik di Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Analisis perencanaan lanskap ekowisata penyu berbasis masyarakat di pantai Nagri Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini maka manfaat yang akan diharapkan:

1. Diharapkan nantinya dapat dijadikan bahan rujukan bagi para pengambil kebijakan pemerintah daerah dalam perencanaan lanjutan di wilayah tersebut dan sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan sejenis di wilayah lain.
2. Bagi akademisi dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan untuk menyusun kebijakan dalam pengembangan kawasan ekowisata.